

# Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun

Ruth Tridianti Sianipar<sup>1</sup>, Juan Anastasia Putri<sup>2</sup>, Ady Inrawan<sup>3</sup>, Hery Pandapotan Silitonga<sup>4\*</sup>, Lenny Dermawan Sembiring<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

<sup>1)</sup>[ruthsianipar@stiesultanagung.ac.id](mailto:ruthsianipar@stiesultanagung.ac.id), <sup>2)</sup>[Juananastasiaputri@gmail.com](mailto:Juananastasiaputri@gmail.com), <sup>3)</sup>[adindr@gmail.com](mailto:adindr@gmail.com),

<sup>4)</sup>[hery@stiesultanagung.ac.id](mailto:hery@stiesultanagung.ac.id), <sup>5)</sup>[lennydermawansembiring@stiesultanagung.ac.id](mailto:lennydermawansembiring@stiesultanagung.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 29 November 2022

Disetujui : 29 November 2022

Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the effectiveness of managing village funds in increasing sustainable economic growth in Simalungun Regency. This research method uses a research design with a qualitative approach. The subject of this research is a village in Simalungun Regency. The research was carried out in four sub-districts in Simalungun Regency in Panombeian Pane, Panei, Siantar, Tanah Jawa, and Sidamanik sub-districts in 80 villages. Data collection techniques using observation, interviews, questionnaires and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis and different test. The research results obtained by respondents stated that village funds channeled from the government were sufficient for village development, in community empowerment village funds were mostly used for village government programs to empower village communities, the village government compiled planning documents consisting of APBDes, RPJMDes, and RKPDes, each program planning must be supported by the village community in its implementation by informing every expenditure and income of funds, supervision conducting regular monitoring related to village physical development, and submission of reports on the use of village funds used for village development need to be submitted transparently.*

**Keywords:** Planning, Implementation, Supervision, Economic Development

## PENDAHULUAN

Perhatian utama pembangunan di Indonesia saat ini ialah pembangunan ekonomi pedesaan, dengan agenda membangun dari daerah pinggiran yang memiliki aksesibilitas dan, tingkat pendidikan yang rendah, serta keseimbangan migrasi negatif. Desa merupakan unit ekonomi yang paling dasar yang mendukung produksi dan kehidupan yang sangat besar (Li, Fan, and Liu 2019). Kemajuan suatu negara dapat terlihat dengan mengidentifikasi kemajuan daerah pedesaan (Boedijono et al. 2019). Pembangunan desa akan berlangsung baik dengan sinergis dan terarah jika diawali dengan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan (Matridi et al. 2015).

Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Suleman et al. 2020). Hal tersebut menyebabkan semakin bertambah kewajiban desa dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah desa.

Karena pada dasarnya pemerintah telah menyerahkan anggaran belanja daerah yang diserahkan kepada badan keuangan daerah untuk dikelola sebaik mungkin sesuai dengan jumlah yang telah disepakati untuk kepentingan masyarakat (Halim and Kusufi 2018). Anggaran yang diserahkan tersebut dikelola oleh pemerintah sampai tingkat terkecil, dalam pemerintah desa dinamakan pengendalian dana desa (Nurlailah, Mukhlis, and Sukanto 2019). Alokasi dana desa dapat dikatakan efektif apabila sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa, serta kebermanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat (Sumianto 2018). Pembangunan yang akan dilakukan sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan ekonomi dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam memperdaya masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka pengembangan wilayah sehingga mampu dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif. Tujuan suatu wilayah dapat tercapai dengan baik bila memiliki perencanaan yang terukur dan dapat dilaksanakan dengan baik (Undang Undang No 6 2014). Diperlukan perencanaan sinergi berkelanjutan dalam meningkatkan pencapaian ekonomi pembangunan masyarakat desa yang bertujuan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (Matridi et al. 2015). Dalam pengelolaan dana desa anggaran desa digunakan dalam pembangunan fisik dan non fisik. Dimana pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan langsung dampaknya kepada masyarakat dalam peningkatan ekonomi di desa.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun secara wilayah administrasi terdiri dari 31 kecamatan. ketigapuluh satu kecamatan ini terbagi dalam 386 desa/nagori dan 27 kelurahan. Dalam situasi terdampak covid 19, penggunaan dana desa pun diperuntukkan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19. Pandemi covid 19 mengakibatkan tingginya angka kemiskinan Kabupaten Simalungun, menurut data BPS pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Simalungun sebesar 8,46% atau 73,64 ribu jiwa penduduk miskin.

Kabupaten Simalungun memperoleh alokasi anggaran untuk Dana Desa (DD) pada tahun 2021 sebesar Rp. 296.800.840.000,00 dari pemerintah pusat. Adapun prioritas penggunaan DD di antaranya untuk jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), padat karya tunai, pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Nagori (BUMNag).

Efektifnya pengelolaan dana desa bila manfaat dari pembangunan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa (Suleman et al. 2020). Dalam pelaksanaannya pembangunan desa ditunjukkan untuk sejumlah besar penggunaan (berbagai pengguna) untuk merumuskan dan mengevaluasi alokasi sumber daya oleh entitas dalam aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuannya dan keputusan yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Sari et al. 2020). Dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat desa, penyediaan sarana dan prasarana sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai (Boonperm, Houghton, and Khandker 2013).

Dalam wawancara awal yang dilakukan diketahui bahwa pada situasi terdampak covid 19, penggunaan dana desa difokuskan untuk mengeliminir dampak yang ditimbulkan diperlukan pengelolaan yang baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan keterbatasan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan dimana terdapat ketidaksesuaian aturan didalam pengelolaan dana desa. Dimana diketahui bahwa program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dana desa yang efektif dikatakan jika manfaat dalam pengelolaan dana tersebut dapat dirasakan masyarakat manfaatnya (Suleman et al. 2020).

Tujuan khusus penelitian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. Adapun urgensi penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menegaskan kembali instrumen penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya dan membangun konsep baru dari model penelitian empiris. Lebih

lanjut, penelitian ini bermaksud mengembangkan kajian kritis dengan maksud memperkaya pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun

## STUDI LITERATUR

### Efektivitas

Keberhasilan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dapat melihat seberapa efisien sumber daya digunakan dalam pencapaian tersebut. Efektivitas digunakan dalam melihat seberapa banyak tingkat pencapaian yang dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prosedur yang ditetapkan organisasi (B. Purba et al. 2021). Dimana dengan melihat efektivitas kita dapat mengukur sejauhmana suatu tujuan organisasi dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang (Palit, Singkoh, and Kumayas 2018).

Dalam mengukur tingkat efektivitas dapat dengan melihat seberapa banyak sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lincoln 2010). Semakin terperinci penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan semakin efektif penggunaan sumber daya tersebut Hal ini tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam melihat perkembangan dan kemajuan suatu organisasi. Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber sumber yang dimiliki dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

### Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang diakui dan di hormati oleh negara untuk menciptakan kesatuan dan mewujudkan suatu tujuan (Suleman et al. 2020). Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pembiayaannya yang lebih salah satunya yaitu Dana Desa. Menurut (Lincoln 2010) bahwa dana desa adalah “dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dapat digunakan untuk membiayai setiap pelaksanaan Desa (Sumianto 2018).

Dalam mengelola dana desa memerlukan prinsip akuntabel dimana masyarakat desa dapat memperoleh informasi dan dilibatkan mengawasi penggunaan dana desa dalam setiap progra kerja yang telah direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Boedijono et al. 2019).

### Pengelolaan Keuangan Kelurahan Desa

Pembangunan pada suatu Desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih baik. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi (Undang Undang No 6 2014):

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian proses rencana kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah pembangunan desa

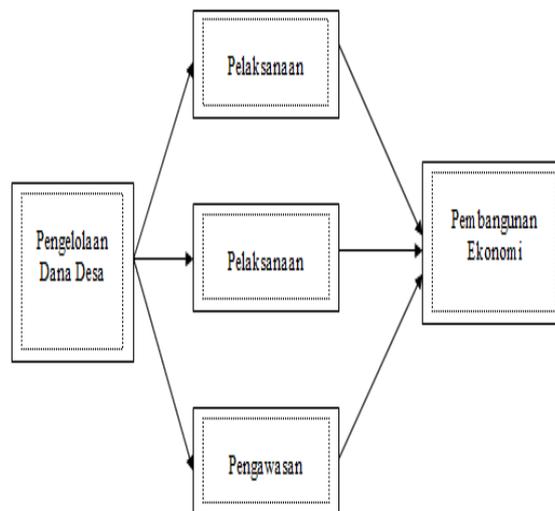
2. Pelaksanaan  
Pelaksanaan merupakan sebuah proses kegiatan yang telah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan suatu program yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa
3. Pengawasan  
Pengawasan merupakan suatu pemantauan kegiatan mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa

### Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan merupakan proses kegiatan perubahan yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan Desa yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui (Peraturan Menteri Desa No.5 2015):

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### METODE

Metode penelitian tertentu didasarkan pada kemampuan untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian tertentu (Tobyn et al. 2018). Dalam penelitian menggunakan penelitian asosiatif yang dilaksanakan dengan dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antar variabel (E. Purba et al. 2021). Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Populasi pada penelitian ini manjerial pada Desa di Kecamatan Siantar, dengan teknik penentuan sampel nonprobability sampel. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian, ayng dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep (Miles, Huberman, and Saldana 2014), yaitu interactive model dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:

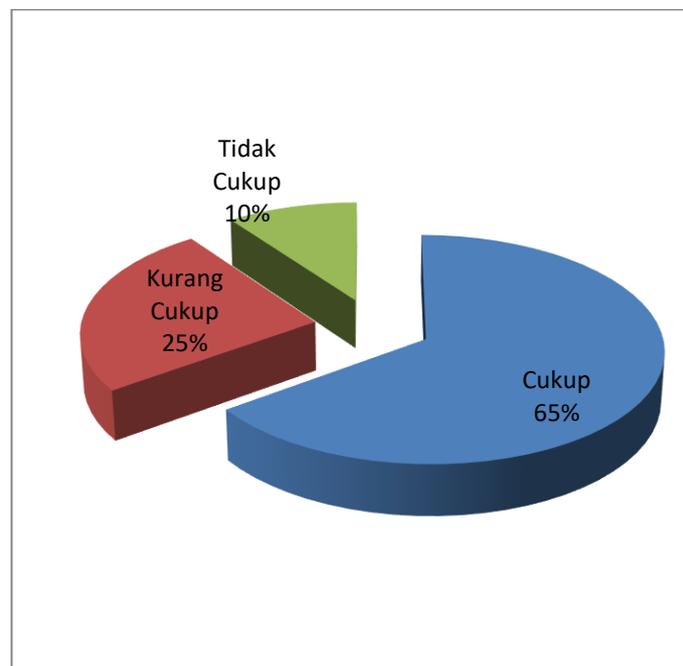
Data-data kualitatif pada penelitian ini diperoleh melalui analisis dengan langkah-langkah (E. Purba et al. 2021), sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan mengcoding data
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori- kategori, dan tema-tema yang dianalisis.
5. Mendeskripsikan dan menghubungkan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif. Menginterpretasi atau memaknai data

### HASIL

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sebuah subsistem dari sistem pemerintah , dimana pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa merupakan unit ekonomi yang paling dasar yang mendukung produksi dan kehidupan yang sangat besar (Li, Fan, and Liu 2019). Alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk di tiap-tiap desa pada masing-masing kabupaten/kota pada suatu daerah, serta angka kemiskinan dan luas wilayahnya. Tujuan suatu wilayah dapat tercapai dengan baik bila memiliki perencanaan yang terukur dan dapat dilaksanakan dengan baik.

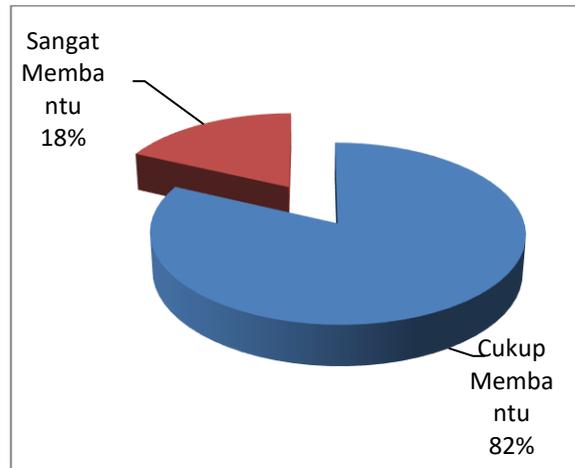
Diperlukan perencanaan sinergi berkelanjutan dalam meningkatkan pencapaian ekonomi pembangunan masyarakat desa yang bertujuan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (Matridi et al. 2015). Hal tersebut menyebabkan dana desa yang diterima masing-masing desa untuk besarnya berbeda-beda.



**Gambar 2. Persepsi Responden Terhadap Kecukupan Dana Desa**

Gambar grafik di atas diperoleh data bahwa secara umum masyarakat menyatakan bahwa dana desa yang disalurkan pemerintah cukup dalam membangun fisik dan non fisik di desa dengan jumlah sebesar 65%, dan 25% menyatakan kurang cukup, serta sisanya 10% menyatakan bahwa dana desa tersebut tidak cukup.

Berdasarkan manfaatnya berikut disajikan persepsi responden:



**Gambar. 3 Persepsi Responden Terhadap Manfaat Dana Desa**

Garfik yang di atas dapat dijelaskan bahwa dana desa cukup membantu masyarakat dalam perkembangan ekonomi dimana persepsi responden sebanyak 82% menyatakan cukup membantu, dan 18% sangat membantu. responden menyatakan. Penggunaan dana desa dalam pembangunan infratrstruktur disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur**

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa, polindes, dan posyandu	17
2.	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) seperti TK, Kelompok bermain	5
3.	Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kedaulatan pangan	11
4.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	12
5.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	13
6.	Pemeliharaan dan pembangunan sanitasi lingkungan	9
7.	Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa	3
8.	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi	12
9.	Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa	7
10.	Pendirian dan pengembangan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa)	11

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan jawaban diketahui bahwa penggunaan dana desa yang paling besar digunakan untuk pembangunan kebutuhan dasar untuk pengemangan pos kesehatan desa, polindes, dan posyandu dengan angka sebesar 17% karena pandemi covid 19 yang sedang dihadapi, lalu sebanyak 16% digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, dimana berdasarkan angka tersebut terlihat seolah pemerintah desa cenderung lebih memperhatikan kondisi jalan

usaha tani. Pembangunan pada hakekatnya membangun kemandirian suatu daerah. Pembangunan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, perencanaan tersebut bergerak dari adanya potensi yang ada dan dikelola dengan baik

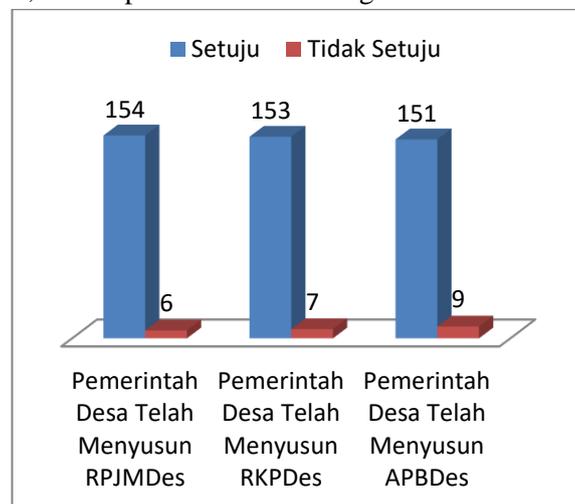
Pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan Dana desa**

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Peningkatan kualitas proses perencanaan desa	28
2.	Mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan BUMDes	20
3.	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa	18
4.	Penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat	29
5.	Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan	-
6.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok lain sesuai dengan kondisi desa	5

Sumber: Data Diolah (2022)

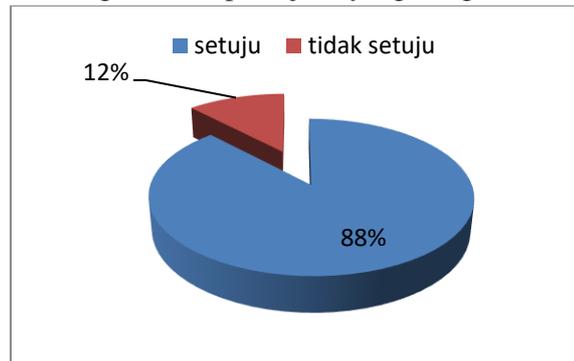
Dalam program pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan angka terbesar yaitu sebesar 29% yaitu penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya dalam peningkatan kualitas perencanaan desa sebesar 28%. Sebanyak 20% mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan BUMDes dan yang paling kecil sebesar 5% digunakan untuk Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.



#### Gambar. 4 Penyusunan Perencanaan Desa

Perencanaan juga dijadikan alat sebagai pengalokasian sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi yang berhubungan dengan harapan di masa yang akan datang. Sedangkan pembangunan merupakan suatu tindakan dalam mengubah kehidupan atau penghidupan masyarakat dalam memenuhi segala macam kebutuhan yang dimilikinya, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju.

Kegiatan pembangunan akan terarah dan terukur apabila didasari perencanaan yang dikontrol dan dievaluasi. Perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan rencana-rencana aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.



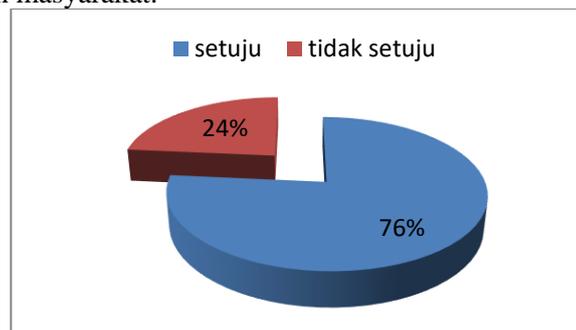
#### Gambar. 5 Perencanaan Pembangunan Desa Disusun Melalui Musyawarah Desa

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di desa telah memperhatikan keperluan masyarakatnya. Masyarakat dilibatkan dalam pembahasan program kerja pemerintah desa, dengan data sebagai berikut:



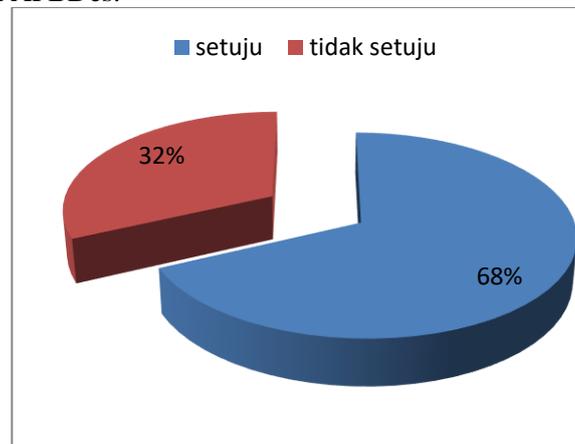
#### Gambar. 6 Masyarakat Dilibatkan Dalam Musyawarah Desa

Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan, maka untuk hal tersebut dalam musyawarah melibatkan masyarakat.



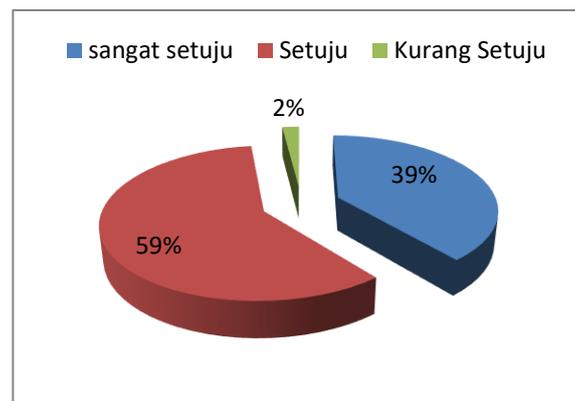
#### Gambar. 7 Penetapan Skala Prioritas Dalam Perencanaan Pembangunan

Hal yang penting lainnya yaitu sumber daya alam sebagai modal fisik. Dan setiap desa memiliki potensi desa yang berbeda. Berikut grafik Pemerintah Desa memperhatikan potensi desa dalam penyusunan APBDes.



**Gambar. 8 Memperhatikan Potensi Desa Dalam Menyusun APBDes**

Masyarakat desa harus mendukung setiap program yang telah ditetapkan Pemerintah desa. Selain itu juga dipengaruhi oleh kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam penyusunan APBDes, RPJMDes, dan RKPDes masyarakat menilai kemampuan aparatur desa sebagai berikut:



**Gambar. 9 Persepsi Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Menyusun APBDes, RPJMDes, dan RKPDes**

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa pemerintah desa dalam menyusun APBDes, RPJMDes, dan RKPDes telah mampu menyusun APBDes, RPJMDes.

## PEMBAHASAN

Tujuan dari alokasi dana desa pada pemerintah desa agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan g didasari pada kemampuan serta sumber daya yang dimiliki dan peluang-peluang yang ada. Manfaatnya diharapkan terjadinya peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh dilakukan untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Seiring dengan semakin pesat pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan berbasis wilayah dilakukan membuat rencana per wilayah yang terperinci serta mempersiapkan rencana-rencana disemua tingkatan dalam mengimplementasikan rencana tersebut (Chimhowu, Hulme, and Munro 2019).

Dalam perencanaan pemerintah desa telah menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam penyusunan rencana tersebut pemerintah desa telah melibatkan masyarakat untuk memperoleh data mengenai kebutuhan masyarakat mengenai sarana dan prasarana (Moeljono and Kusumo 2019). Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pada Kabupaten Simalungun telah dilibatkannya masyarakat dalam membahas rencana kerja, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak asal-asalan dalam merencanakan pembangunan desa, namun memperhatikan kebutuhan yang diperleukan masyarakatnya (Boedijono et al. 2019).

Tujuan suatu wilayah dapat tercapai dengan baik bila memiliki perencanaan yang terukur dan dapat dilaksanakan dengan baik. Diperlukan perencanaan sinerdi berkelanjutan dalam meningkatkan pencapaian ekonomi pembangunan masyarakat desa yang bertujuan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan (Matridi et al. 2015). Hal yang sangat diperhatikan dalam penyusunan rencana ialah kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan APBDDes, RKPDDes, dan RPJMDes kegiatan, kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB desa, swadaya masyarakat, serta APBD Kabupaten/Kota. Dua hal tersebut RPJM dan RKP merupakan dua syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan APB Desa. Antara RPJM desa serta Kabupaten/Kota harus memiliki konsolidasi agar pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan memiliki berkesinambungan. Arah kebijakan yang saling mendukung antara desa dan Kabupaten/Kota maka akan dicapai kebijakan pembangunan yang diinisiasi dari atas.

Setelah pembangunan dana desa telah direncanakan sesuai undang-undang yang berlaku, tahap yang tidak kalah penting ialah pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemantauan menjadi tahap yang sangat penting dimana alokasi dana yang telah direncanakan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang sering dilupakan selama kegiatan berlangsung adalah melakukan monitor dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Kebanyakan hanya melihat bahwa kegiatan tersebut telah berjalan namun tidak mengathaui apakah target dan substansi tujuan telah tercapai atau belum. Maka pemerintah desa mengoptimalkan fungsi sebagai penyelenggara dan sebagai memonitor dan mengevaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat dimungkinkan terlibat dalam hal monitoring pelaksanaan pembangunan yang sedang terjadi. Pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat.

Diperlukan mekanisme yang mengatur agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel yaitu mekanisme pengawasan. Pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan tersebut diantaranya masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan dalam perkembangannya BPK dilibatkan dalam pengawasan dana desa. Dalam penjabarannya perencanaan dalam pembangunan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, dan mengatasi kemiskinan dengan peningkatan kesejahteraan, pembangun sarana dan prasarana, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara berkesinambunga.

## KESIMPULAN

Desa membangun memiliki arti menciptakan kemandirian desa, sedangkan membangun desa terletak kepada perhatian pemerintah akan kebutuhan masyarakat suatu desa tersebut. Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut dijadikan acuan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, yang bertujuan mengintegrasikan seluruh kebutuhan masyarakat dalam mencapai visi dan misi kepala desa sebagai arah pembangunan yang berfokus kepada perencanaan pembangunan tersebut.

Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan. Hal tersebut dapat tercapai dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi pada daerah tersebut. Pada perencanaan pembangunan desa menggunakan dua pendekatan yaitu, desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan.

Penyusunan rencana pembangunan desa disusun dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan APBDDes. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut dijadikan acuan dalam menyusun anggaran

pendapatan dan belanja desa, yang bertujuan mengintegrasikan seluruh kebutuhan masyarakat dalam mencapai visi dan misi kepala desa sebagai arah pembangunan yang berfokus kepada perencanaan pembangunan tersebut. Pemerintah desa mengoptimalkan fungsi sebagai penyelenggara dan sebagai pemonitor dan mengevaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat dimungkinkan terlibat dalam hal monitoring pelaksanaan pembangunan yang sedang terjadi. Pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat dimulai sejak tahapan perencanaan pembangunan.

#### REFERENSI

- Boedijono, Boedijono et al. 2019. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 4(1): 9–20.
- Boonperm, Jirawan, Jonathan Haughton, and Shahidur R. Khandker. 2013. "Does the Village Fund Matter in Thailand? Evaluating the Impact on Incomes and Spending." *Journal of Asian Economics* 25: 3–16. <http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2013.01.001>.
- Chimhowu, Admos O., David Hulme, and Lauchlan T. Munro. 2019. "The 'New' National Development Planning and Global Development Goals: Processes and Partnerships." *World Development* 120: 76–89. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.013>.
- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Li, Yurui, Pengcan Fan, and Yansui Liu. 2019. "What Makes Better Village Development in Traditional Agricultural Areas of China? Evidence from Long-Term Observation of Typical Villages." *Habitat International* 83(October): 111–24. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.11.006>.
- Lincoln, Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. 5th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Matridi, Raja Abumanshur et al. 2015. "An Evaluation of P3DK (An Acceleration of Development Village Program): A Reviewing on Failure toward Revolving Loan Fund System in Kepulauan Riau Province, Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169(August 2014): 189–97. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.302>.
- Miles, M.B, A.M Huberman, and Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publications.
- Moeljono, Moeljono, and Willyanto Kartiko Kusumo. 2019. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)." *Solusi* 17(3): 61–76.
- Nurlailah, Lana, Mukhlis Mukhlis, and Sukanto Sukanto. 2019. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Fisik Desa Di Kecamatan Indralaya Dan Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir." : 1–25. <https://repository.unsri.ac.id/6397/>.
- Palit, Theodorus, Frans Singkoh, and Neni Kumayas. 2018. "EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW." *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1(1).
- Peraturan Menteri Desa No.5. 2015. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Purba, Bonaraja et al. 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Purba, Elidawaty et al. 2021. Penerbit Yayasan Kita Menulis *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sari, Dian Cita et al. 2020. *Manajemen Pemerintah*. Gorontalo: Ideaspublishing.

Suleman, Abdul Rahman et al. 2020. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sumianto, La. 2018. “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi.” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 3(1): 33–42.

Tobyn, Mike, Ana Patricia Ferreira, Chris Morris, and José C. Menezes. 2018. “The Preeminence of Multivariate Data Analysis as a Statistical Data Analysis Technique in Pharmaceutical R&D and Manufacturing.” *Multivariate Analysis in the Pharmaceutical Industry*: 3–12.